

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS KOMPETENSI

Muhroji

Jurusan MIPA - Biologi - FKIP
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The national educational department determines that in 2004/2005, the school has to imply curriculum 2004 which is known as competency based curriculum (KBK). The problem is the socialization of KBK does not cover all of the teachers and the instruments. Most of the teachers neither understand nor have the same perception about it. The aims of this activity are: 1. to introduce the concept of KBK and prepare the learning for the teachers, 2. to inform the teachers how to assess dealing with competency based curriculum, 3. to know how competency based curriculum is managed by the school.

Kata kunci: *kurikulum berbasis kompetensi*

PENDAHULUAN

Kurikulum 1984 yang beberapa kali dimodifikasi dan disempurnakan sehingga menjadi kurikulum 1994 mulai tahun ajaran baru 2004-2005 secara resmi tidak dipakai lagi. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia adalah kurikulum 2004 yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi. Setiap perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dengan sendirinya berjalan lancar sebagaimana diharapkan pengambil kebijakan. Dalam praktek pendidikan yang ada dilapangan banyak kendala yang dihadapi. Hal, ini tidak lepas dari permasalahan negara Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara yang luas, negara yang besar, jumlah penduduknya yang banyak, kemampuan pemerintah dan masyarakat yang terbatas dan kondisi masyarakat yang sangat heterogen.

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan formal dan non formal. Kurikulum adalah pedoman yang akan dipakai oleh pendidik/guru dalam melakukan pembelajaran di kelas maupun luar kelas. Adanya perubahan kurikulum mempengaruhi guru dalam membuat perencanaan

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan sistem evaluasi yang akan digunakan oleh guru. Perubahan kurikulum juga mempengaruhi sumber bahan yang dipakai oleh guru, sarana pembelajaran dan strategi pembelajaran yang ada.

Perubahan kurikulum yang berbasis kompetensi merupakan salah satu usaha peningkatan mutu pendidikan, dan ini sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Bank Dunia (Depdiknas, 2003). Salah satu kelemahan sosialisasi pengelolaan manajemen berbasis sekolah dengan melalui implementasi kurikulum berbasis kompetensi adalah kurangnya fasilitas pendukung. Pada akhir tahun ajaran 2003-2004 dipastikan tidak semua sekolah dapat mengikuti sosialisasi secara formal melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Depdiknas. Depdiknas hanya menargetkan sosialisasi dapat dilakukan di 1000 sekolah. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lainnya. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh swasta? Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada dibawah departemen lain, seperti Depag misalnya.

Kelemahan ini tentu saja harus disikapi sebagai bagian dari kemandirian sekolah dalam mengelola pendidikan. Sekolah harus antisipatif terhadap perubahan yang ada. Sosialisasi KBK bisa bekerja sama dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi yang ada untuk mengadakan sosialisasi KBK tersebut. Disamping itu perguruan tinggi dapat memaksimalkan pelaksanaan Tridarmanya dengan bekerja sama dengan sekolah yang mungkin tidak terjangkau program sosialisasi KBK Depdiknas.

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah kecamatan Ngawen yang mengelola tujuh SD/MI dan dua SMP Muhammadiyah sangat berkepentingan terhadap peningkatan mutu pendidikan dan lebih khusus terhadap sosialisasi KBK. Karena hanya sebagian kecil guru yang ada yang telah mengikuti sosialisasi KBK. Dengan adanya sosialisasi KBK yang dilaksanakan atas kerja sama FKIP UMS dan Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Ngawen diharapkan semua guru yang ada di SD/MI dan SMP Muhammadiyah Ngawen dapat melaksanakan kurikulum 2004 dengan baik. Artinya, 1. Guru dapat membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2004. 2. Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2004. 3. Guru dapat mengadakan evaluasi belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum 2004.

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi

yang harus dikuasai anak didik harus dinyatakan sedemikian rupa sebagai wujud hasil belajar peserta didik berdasarkan pengalaman langsung. Oleh karena itu, tidak hanya guru yang harus tahu tujuan belajar tetapi peserta didik juga harus tahu tujuan belajar yang diharapkan.

Kurikulum berbasis kompetensi lebih menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performan tertentu. KBK mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang pencapaiannya berupa perilaku atau ketrampilan peserta didik sebagai suatu kriteria pembelajaran.

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik (Depdiknas, 2002) sebagai berikut: 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang memenuhi unsur edukatif, 5. Penekanan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Komponen penting dalam menerapkan kurikulum berbasis kompetensi adalah kemampuan lulusan, standard kompetensi, kemampuan dasar, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, pengalaman belajar dan indikator pencapaian (Djemari mardapi, 2004). Kemampuan lulusan ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Standard kompetensi tiap mata pelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan suatu lembaga pendidikan.

Standard kompetensi dijabarkan menjadi sejumlah kemampuan dasar. Standard kompetensi menggunakan kata kerja operasional yang masih bersifat umum. Dalam kemampuan dasar kata kerja yang digunakan harus operasional, dalam arti bisa diukur. Kata kerja operasional yang digunakan termasuk mengukur level berfikir menengah sampai tinggi, bukan bersifat hafalan. Kata kerja yang disarankan adalah: mengidentifikasi, membandingkan, membedakan, merangkum, menghitung, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan sejenisnya.

Kemampuan dasar digunakan untuk menentukan materi pelajaran dan pengalaman belajar. Kemampuan dasar juga digunakan sebagai acuan dalam menentukan indikator pencapaian kemampuan dasar. Indikator pencapaian kemampuan dasar harus menggunakan kata kerja operasional dan cakupan materinya lebih sempit dibanding kata kerja pada kemampuan dasar. Indikator

ini merupakan acuan bagi penulis soal ujian. Penilaian yang digunakan dalam KBK adalah penilaian yang berbasis kelas. Artinya penilaian yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar.

Peningkatan kualitas pendidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi menuntut adanya perubahan pola pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, metode penilaian dan pengelolaan kurikulum. Dengan demikian kurikulum berbasis kompetensi berhasil dimasyarakatkan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran di sekolah.

MANAJEMEN KBK

Manajemen berbasis sekolah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam memutuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan serta monitoring penyelenggaraan sekolah dengan melibatkan stake holder atau semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan sekolah tersebut. Dalam era otonomi daerah sekolah mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan KBK. Walaupun tetap terikat dengan kebijakan yang sifatnya nasional, seperti standard kompetensi, standard pelayanan minimal maupun silabinya.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom telah diatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan KBK, pemerintah pusat memiliki wewenang: a. Menetapkan kebijakan dasar standard kompetensi lulusan, kompetensi dasar, silabi dan materi pokok secara nasional, dan b. Pedoman pelaksanaan, seperti pedoman penilaian hasil belajar, pola pembelajaran, manajemen pelaksanaan, kalender pendidikan, dan waktu belajar efektif. Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Nasional) kabupaten memiliki wewenang mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan indikator pencapaiannya.

Sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan guru sebagai pelaksana KBK dituntut untuk memahami standard kompetensi, silabi dan indikator yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Manajemen KBK di sekolah meliputi kegiatan: *pertama*, dalam perencanaan KBK sekolah bertugas: a.

Mengembangkan silabi sesuai dengan kondisi siswa dan kebutuhan masyarakat sekitar sekolah, b. Mengembangkan materi ajar, c. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan d. Mengembangkan instrumen penilaian. Sekolah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun sekolah yang lain untuk membuat silabi sekolah, menentukan materi ajar dan satuan pelajaran. Guru dalam menyusun rencana pembelajaran berdasarkan satuan pelajaran sekolah. rencana tersebut memuat metode pembelajaran, perkiraan waktu, pemanfaatan fasilitas, pola penilaian dan tindak lanjut.

Rencana pembelajaran yang dibuat guru harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak. Artinya rencana yang dibuat berdasarkan diagnosis kemampuan dan perkembangan peserta didik, yang berupa: kelebihan, kekurangan, hambatan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi peserta didik. Rencana pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan *multi metode* dan *multi media*, agar semua siswa terlayani dan proses pembelajaran lebih menarik.

Rencana penilaian dapat dibuat dengan bekerja sama dengan guru sekolah lain yang biasanya diwadahi dalam MGMP. Rencana penilaian mencakup pemahaman standar kompetensi, pengembangan indikator pencapaian kompetensi, penetapan pola penilaian dan penyusunan instrumen penilaian. Penetapan pola penilaian dan penyusunan harus memperhatikan ranah kompetensi yang harus dikuasai siswa, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Pola penilaian bisa berbentuk tes maupun non tes, tes bisa dilaksanakan tertulis maupun unjuk kerja.

Kedua, seperti telah dikemukakan di muka bahwa kurikulum berbasis kompetensi dalam pembelajaran menggunakan pendekatan belajar tuntas dan mengakui adanya perbedaan individu dalam kecepatan belajar. Implikasi dari konsep ini tentu saja pengelompokan siswa dalam kelas harus lebih homogen, dan pelayanan yang dilakukan oleh guru untuk masing-masing siswa tidak sama, oleh karena itu disamping pengajaran dilakukan secara klasikal juga dilaksanakan secara individual. Bagi siswa yang lambat harus dilakukan pengajaran remedial, sedang bagi siswa yang cepat harus dilakukan pengayaan atau bila mungkin dilakukan program akselerasi atau program anak berbakat atau apapun namanya yang mana memungkinkan siswa dapat menyelesaikan pendidikannya lebih cepat dibandingkan siswa yang lain. Bila SDM yang ada di sekolah kurang memadai dimungkinkan bekerja sama dengan beberapa sekolah mengadakan program-program tersebut.

Ketiga, berdasarkan rencana pelajaran yang telah disusun, guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dengan memperhatikan prinsip-prinsip belajar dan ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Prinsip belajar ini berkaitan dengan: perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual.

Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah: a. Berpusat pada siswa, b. Belajar dengan melakukan, c. Mengembangkan kemampuan sosial, d. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah, e. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, f. Mengembangkan kreatifitas siswa, g. Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi, h. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, i. Belajar sepanjang hayat, dan j. Perpaduan kompetensi, kerja sama dan solidaritas.

Pendekatan belajar tuntas menetapkan kriteria pencapaian kompetensi minimal 75 % dari yang telah ditetapkan. Oleh karena itu setiap kegiatan belajar mengajar diikuti dengan evaluasi pencapaian kompetensi siswa dan diikuti rencana tindak lanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tindak lanjutnya dapat berupa pemberian remidi, melanjutkan kegiatan belajar mengajar berikutnya atau pengayaan atau diadakan program akselerasi. Kegiatan ini akan berjalan dengan baik apabila ditunjang sistem informasi akademik yang baik. Oleh karena itu kerja sama yang baik antara guru mata pelajaran, wali kelas, tenaga administrasi dan kepala sekolah sangat diperlukan.

Keempat, evaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi perlu dilakukan setiap tahun ajaran. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak sekolah maupun instansi diluar sekolah. Evaluasi harus mencakup input, proses, dan out put maupun out come. Input meliputi: peserta didik, tenaga pengajar atau guru, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan sekolah, kompetensi yang ditetapkan dan materi pelajaran.

Evaluasi proses meliputi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan proses manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah, termasuk didalamnya masalah kepemimpinan dan organisasi. Sedangkan evaluasi out put maupun *out come* berkaitan dengan sejauh mana kompetensi yang telah ditetapkan dapat dikuasai oleh peserta didik dan manfaat yang diperoleh masyarakat setelah alumni terjun di masyarakat.

Kelima, kurikulum berbasis kompetensi yang pendekatannya pada pembelajaran tuntas dan pengajaran individual menuntut adanya sistem informasi

yang baik. Sistem informasi ini menyediakan informasi kepada pengguna. Pengguna bisa berasal dari internal sekolah; guru, wali kelas, kepala sekolah maupun eksternal sekolah; orang tua, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Informasi bisa berupa laporan insidental atau laporan rutin.

Laporan dibuat oleh guru, wali kelas dan laporan yang dibuat oleh kepala sekolah. Laporan guru memuat pencapaian kompetensi masing-masing peserta didik dari mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan guru bisa dilengkapi dengan informasi yang berkaitan dengan hambatan dan masalah-masalah yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan dan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan laporan guru mata pelajaran wali kelas membuat laporan pencapaian kompetensi kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada kepala sekolah dan orang tua peserta didik. Laporan bisa dilengkapi dengan masalah-masalah yang dihadapi kelas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kepala sekolah membuat laporan secara keseluruhan tentang profil kompetensi sekolah yang dipimpinnya berdasarkan laporan guru dan wali kelas. Laporan ini mencakup input/masukan, proses, *out put* maupun *out come*. Laporan dibuat secara transparan agar semua *stake holder* sekolah dapat memanfaatkan informasi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah yang bersangkutan.

METODE PENGABDIAN

Sasaran pengabdian masyarakat adalah guru-guru SD/Mi dan SMP Muhammadiyah se kecamatan Ngawen Klaten. Pelaksanaan pengabdian dilakukan pada hari sbtu tanggal 29 Mei 2004 di MI Muhammadiyah Candirejo, Ngawen, Klaten. Metode yang digunakan berbentuk penataran dan workshop, artinya setelah pemberian materi dan tanya jawab dilanjutkan dengan peserta mempraktekkan apa yang telah diterima dari penatar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Ngawen ini tidak memungkinkan bagi pelaksana untuk mengadakan penilaian secara komprehensif, karena pelaksanaan pengabdian hanya dilakukan selama satu hari. Dengan melihat antusias peserta serta respon yang diberikan peserta selama acara berlangsung dapat dikatakan suksesl Rencana kegiatan yang dilakukan hanya melibatkan

40-50 guru, pada pelaksanaan yang hadir 79 orang. Setelah acara selesai adanya permintaan kegiatan serupa dilaksanakan dengan materi yang berbeda dan bila perlu diperluas dan materinya lebih spesifik.

Kegiatan semacam ini bagi guru-guru di daerah sangat diharapkan karena minimnya kegiatan pengembangan guru yang ada di daerah. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan dana yang dimiliki daerah, khususnya organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kegiatan penataran dan peningkatan profesional guru sangat penting bagi guru dalam rangka meningkatkan kemampuannya di dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengabdian masyarakat yang dilakukan di Ngawen Klaten yang dilakukan atas kerja sama Lembaga Pengabdian Masyarakat UMS dengan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kecamatan Ngawen berhasil dengan baik. Keberhasilan ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang ada dan respon peserta selama kegiatan berlangsung.

Melihat keberhasilan pengabdian yang dilakukan di Ngawen disarankan kepada LPM UMS didalam melakukan pengabdian masyarakat lebih diutamakan di daerah-daerah yang jauh dari Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pengabdian dapat dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengabdian ini. Mudah-mudahan amal baik bapak/ibu/saudara mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

DASFTAR PUSTAKA

Depdiknas. 2003. *Kurikulum 2004*, Jakarta: Depdiknas.

Puskur Balitbang Depdiknas. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Depdiknas.

_____. 2002. *Penilaian Berbasis Kelas*, Depdiknas: Jakarta

Djemari Mardapi. 2004. "Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi".
Makalah. Surakarta: FKIP-UMS:

Kedaulatan Rakyat. 14 Februari 2004.